

Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Menurunkan Stunting (SDG 2.2)

Jonathan Edward Lopian¹, Insan Harapan Harahap²

^{1,3} Program Studi Ilmu Politik, Universitas Bakrie

¹lj.lopian25@gmail.com

² Program Studi Ilmu Politik, Universitas Bakrie

²insan.harahap@bakrie.ac.id

Sumbitted : 2024-01-10 | Reviewed : 2024-01-16 | Accepted : 2024-01-17

Abstract— *In light of the determination to address Sustainable Development Goals, the Indonesian government has established the vision of “Indonesia Emas 2045”, with human development and the ability of science and technology to play a significant role in increasing health and society’s quality of life. To achieve this vision, Indonesia has to solve the challenges in public welfare including stunting as a chronicle condition that affects child growth and development. These challenges related to Zero Hunger of SDG 2 which aims to end poverty and access to safe and nutritious food to be met by all levels of society. In order to gain a comprehensive analysis of the efforts of the Indonesian government to reduce stunting rates, this study has undertaken the limitations of research within the Banyuwangi Regency as one of the top levels of stunting rates in national prevalence in 2018 with an improvement trend of 8% in the following year. This study accessed data from the officials’ site of the Banyuwangi government and the results of previous research to subsequently subjected to descriptive analysis method with a qualitative approach. The findings of this research indicate the significant accomplishment of Banyuwangi Regency’s government in solving the stunting problems within the regency as the result of a commitment to achieving Zero Stunting as the answer to SDG 2.*

Keywords— *Sustainable Development Goals; Stunting; SDG 2; Banyuwangi Regency; Zero Hunger.*

PENDAHULUAN

Sasaran Millennial Development Goals (MDG) pada tahun 2015 adalah menanggulangi kemiskinan, kelaparan, pendidikan, diskriminasi perempuan, kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit, dan perbaikan kualitas lingkungan, meskipun keadaan secara global masih berada dalam kondisi krisis sumber daya alam, lingkungan, iklim, sosial, hingga ketahanan pangan dan energi, sehingga mengarahkan dunia akan pentingnya persiapan keberlanjutan agenda pembangunan (BAPPENAS, 2010). Oleh karenanya, hadirilah *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diharapkan dapat menjadi penyelesaian akan masalah yang belum terselesaikan (Sutopo et al., 2014). Pada penerapannya, SDGs ditempatkan sebagai suatu program dunia yang dipersiapkan dalam jangka panjang yang dimulai dari tahun 2016-2030, untuk mengoptimalkan nseluruh potensi maupun sumber daya tiap negara yang terfokus dalam 17 Tujuan SDGs. Berprinsip “*no one left behind*”, SDGs menekankan kepada kesetaraan dengan memastikan terwujudnya sifat inklusif dimana tidak ada satupun pihak yang tertinggal (Sofianto, 2019).

Indonesia adalah negara besar, baik secara jumlah manusia dan luas wilayahnya. Sebagai bangsa besar, Indonesia memiliki visi “Indonesia Emas 2045” yang digagas pada tahun 2019 setelah dua tahun penyusunan. Salah satu pilar pada Indonesia Emas 2045 adalah pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK, dengan menekankan peningkatan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat (Bappenas, 2019). Dalam rangka mencapai visi tersebut Indonesia saat ini masih memiliki beberapa masalah, salah satunya adalah *stunting*. *Stunting* merupakan kondisi kronis yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, yang diakibatkan oleh kurangnya gizi yang didapatkan anak secara cukup. Ketidakcukupan asupan nutrisi terjadi mulai dari janin masih berada didalam kandungan hingga kemudian nampak saat anak telah memasuki usia dua tahun yang ditandai dari hasil standar antropometri anak yang berada dibawah ambang batas (Sutarto et al., 2018).

Stunting menjadi salah satu perhatian utama pemerintah Indonesia karena dapat menjadi penghambat untuk bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Mempercepat penurunan *stunting* pada anak usia 0-5 tahun tercermin pada RPJMN 2020-2024, angka *stunting* ditargetkan turun menjadi 14% secara nasional pada tahun 2024 dengan melibatkan secara efektif berbagai *stakeholder* baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah (Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, 2020). Pemerintah Indonesia merumuskan “Peta Jalan Percepatan Pencegahan Stunting Indonesia 2018-2024” sebagai langkah strategis untuk menurunkan angka *stunting* di Indonesia melalui 5 pilar utama: komitmen politik dan visi kepemimpinan nasional; kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku; kovergensi program dan kegiatan dari mulai tingkat pusat, kabupaten/kota dan desa; kebijakan ketahanan pangan dan gizi; monitoring dan evaluasi.

Zero Hunger sebagai poin ke-2 dari 17 tujuan SDGs berfokus untuk menghilangkan kelaparan dan mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik. Dengan diupayakannya poin ini, diharapkan bahwa kelaparan dapat diakhiri, serta akses pangan yang aman dan bernutrisi dapat terpenuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Lebih dalam pada poin ke-2.2, menitikberatkan untuk mengakhiri terjadinya *stunting* (gangguan pertumbuhan anak) dan *wasting* (kurang gizi atau gizi buruk).

Hal ini didasarkan pada situasi Indonesia yang mengalami masalah pada gizi, khususnya asupan gizi pada balita. Di tahun 2022, tercatat bahwa terdapat sekitar 21,6% balita di Indonesia yang menderita *stunting* dan diakibatkan oleh kurangnya pemenuhan gizi (Tarmizi, 2023).



Sumber: Riskesdas, SSGI

Grafik 1. Prevalensi Stunting Nasional 2018-2022

Kabupaten Banyuwangi menjadi daerah yang menarik untuk membahas kasus *stunting*. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tercatat pada tahun 2018 angka *stunting* di Kabupaten Banyuwangi menempati posisi di atas prevelansi nasional. Namun, setahun berikutnya angka prevelansi *stunting* di Kabupaten Banyuwangi mengalami tren perbaikan hampir 8%. Kenaikan angka ini

mengindikasikan kondisi yang lebih baik pada prevelansi nasional apabila dibandingkan dengan tahun yang sama.B



Sumber: Riskesdas, SSGI

Grafik 2. Prevalansi Stunting Banyuwangi 2018-2022

Permasalahan ketidakcukupan gizi yang menyebabkan anak mengalami gangguan perkembangan menjadi fokus utama pemerintah dalam berupaya untuk mencapai kesejahteraan. Di Kabupaten Banyuwangi sendiri, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 7 miliar yang diperuntukkan sebagai bentuk intervensi pemerintah kabupaten kepada para ibu hamil dengan risiko tinggi serta bayi dengan umur di bawah dua tahun. Dalam pengimplementasiannya, anggaran ini disebar kepada 25 kecamatan, yang dilakukan dengan cara menjalin kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha. Untuk melakukannya, pemerintah tingkat kecamatan dan desa bermitra dengan warung dalam rangka mendistribusikan makanan dengan nutrisi tinggi, yaitu telur, ikan, ayam, dan daging. Selain itu, perkembangan program ini dimonitor melalui kader posyandu yang bertugas mengunggah data nutrisi harian yang diterima menggunakan aplikasi Banyuwangi Tanggap *Stunting*. Sementara itu, data yang diperoleh pemerintah secara nyata didukung pula dengan pantauan bidan dan petugas puskesmas setempat secara rutin (Yasmin, 2023)

Tingginya angka kasus bayi dua tahun (*baduta*) dan ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi di Banyuwangi ditandai dengan peningkatan pada tahun 2020. Tercatat bahwa di tahun tersebut jumlah anak yang menderita *stunting* meningkat sebesar 400 kasus atau bertambah 8,2% apabila dibandingkan dengan data dari tahun 2019 (Su'udi & Pratiwi, 2022). Oleh karenanya, pemerintah berupaya menciptakan program inovatif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, salah satunya melalui sistem digitalisasi bernama *Smart Kampung*. Sistem ini sendiri merupakan program pengembangan 25 desa di Kabupaten Banyuwangi yang terintegrasi dengan mengkolaborasi antara penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan kegiatan masyarakat yaitu pemenuhan sektor ekonomi produktif, kreatif, kesehatan, pelayanan publik, dan lainnya dalam upaya menangani kemiskinan.

Selain itu, penanganan kasus *stunting* didukung pula oleh pemerintah tingkat pusat yang diwakili oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dimana sejak tahun 2019 pemerintah telah mendistribusikan fasilitas tempat cuci tangan berupa keran cuci tangan permanen, keran dengan bahan ember baru, dan keran yang terbuat dari bahan daur ulang. Hal ini merupakan langkah efektif pemerintah dalam memerangi kasus *stunting* meskipun tidak berdampak secara langsung, mengingat kebersihan dapat memengaruhi kondisi kesehatan pada anak. Selanjutnya, dalam mengoptimalkan tumbuh kembang anak dan kesehatan ibu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerapkan inovasi bernama Generasi Anak Top (Gerakan ASI) yang dilakukan dibawah pengawasan Puskesmas sebagai pemegang peran sentral. Adapun tujuan dari gerakan ini adalah sebagai bentuk pendukung dalam mengkampanyekan Air Susu Ibu (ASI), yang merupakan sumber zat gizi utama bagi bayi (Dinkes Banyuwangi, 2021). Dalam menjaga kestabilan program ini,

Pemerintah yang dibantu oleh Puskesmas pun melakukan Wisuda Ibu yang telah lulus dari menjalani ASI eksklusif dengan periode setahun sekali, guna meraih dukungan dari seluruh lapisan masyarakat untuk menerapkannya secara berkelanjutan.

Di sisi lain, penanggulangan gizi buruk di Kabupaten Banyuwangi tentu tidak terlepas dari peran para kader Pos Pelayanan Keluarga Berencana & Kesehatan Terpadu (Posyandu) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Hal ini dikarenakan standarisasi dari kedua peran besar tersebut mampu menjawab keinginan pemerintah pusat dalam melakukan revitalisasi, dan membuatnya sebagai garda terdepan. Di Banyuwangi sendiri, program Posyandu Kreatif yang dilakukan oleh PKK telah berjalan selama lebih dari tiga tahun dan bertindak sebagai mitra strategis dalam mengawari tumbuh kembang anak.

Dalam menangani *stunting*, Kabupaten Banyuwangi tidak hanya berfokus pada pembentukan program-program namun juga mengacu pada peraturan. Dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 68 Tahun 2020 tentang Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*, dijelaskan bahwa Program Banyuwangi Tanggap *Stunting* dibuat sebagai ukuran dalam memproyeksikan keberhasilan dan kegagalan setelah melakukan aksi di lapangan (Anjarwati et al., 2023). Hal ini penting, agar pemerintah dapat mempertimbangkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Sementara itu, disusun pula Keputusan Bupati Banyuwangi Tahun 2022 mengenai Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang dipimpin oleh Camat, Kepala Puskesmas, dan anggota tenaga kesehatan lainnya untuk bertugas menekan jumlah sasaran prioritas bayi *stunting* yang masih berada dalam angka yang cukup tinggi. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan memaparkan upaya pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menurunkan angka *stunting*

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deksriptif dengan pendekatan kualitatif, berawal dari uraian latar belakang permasalahan *stunting* di Kabupaten Banyuwangi. Dilanjutkan pembahasan dan analisa terkait permasalahan *stunting* dan program-program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menurunkan angka *stunting*. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data dan informasi terkait *stunting* di Kabupaten Banyuwangi yang diperoleh dari artikel ilmiah, berita dan website resmi, yang kemudian disajikan dan dianalisis berdasarkan indikator SDG poin 2.2, peraturan perundangan, dan peraturan daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Banyuwangi merupakan wilayah paling timur Pulau Jawa dengan penduduk sebanyak 1,7 juta jiwa. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 7,51% penduduk Kabupaten Banyuwangi berada dalam angka kemiskinan dan 16.100 penduduk diantaranya berada pada kondisi kemiskinan ekstrem. Dalam kaitan dengan permasalahan *stunting* akan selalu ada kaitan antara kemiskinan dan kurangnya pemenuhan gizi pada anak dan ibu hamil. Pada tahun 2018 angka *stunting* Kabupaten Banyuwangi tercatat melampaui angka nasional sebesar 32%. Namun, selang satu tahun kemudian Kabupaten Banyuwangi berhasil menurunkan angka *stunting* ke angka 24,46%. Penurunan angka *stunting* lebih dari 7% dalam satu tahun merupakan prestasi luar biasa dan kemudian dilanjutkan dengan penurunan angka *stunting* lebih lagi sehingga menyentuh angka prevalensi *stunting* 19,2% di tahun 2022 (Annur, 2023).

Bupati Kabupaten Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menargetkan penurunan angka *stunting* dibawah 14% pada tahun 2024. Angka tersebut sangat mungkin tercapai bila melihat penurunan yang signifikan pada penurunan angka *stunting* di Kabupaten Banyuwangi. Target angka *stunting* 14% secara nasional juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo sebagai target tahun 2024. Walaupun WHO (*World Health*

Organization) hanya menargetkan angka *stunting* 20%, Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai tujuan pembangunan bersama atau SDG (*Sustainable Development Goals*) yang memiliki target nol *stunting* pada tahun 2030 sesuai poin SDG 2.2 (Sutopo et al., 2014).

Jika kita melihat dari sisi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi, memang dapat dikatakan masih berada pada pendapatan usaha yang tergolong rendah. Dengan rendahnya status sosial ekonomi penduduk Banyuwangi, faktor ekonomi ini juga bisa menjadi faktor pertama bagi masyarakat yang kurang mampu untuk terkena permasalahan *stunting* ini, dan juga bisa menjadi faktor bagi masyarakat yang kurang mampu ini untuk berkesempatan mendapatkan edukasi lebih (Hariyadi & Ekayanti, 2011).

Stunting sendiri merupakan kondisi dimana anak tidak mendapatkan gizi yang cukup yang berdampak pada tumbuh kembang anak seperti memiliki berat badan dan tinggi dibawah angka normal anak seusianya. Hal ini biasanya juga terjadi karena faktor saat masih dalam kandungan ibunya kurang mendapatkan makanan yang bernutrisi dan berpengaruh kepada anak dan ibunya Kondisi *stunting* ini bisa dikatakan kondisi kekurangan gizi kronis yang menyebabkan kegagalan pertumbuhan pada anak dan biasanya berlangsung dalam jangka waktu yang lama terutama pada seribu hari pertama kehidupan (Purbowati et al., 2021).

Menurut World Health Organization (WHO) pada tahun 2015, *stunting* tidak hanya merupakan sebuah gangguan tumbuh kembang anak saja, melainkan adanya infeksi berulang. Lalu pada tahun 2020, WHO juga memberi keterangan bahwa *stunting* merupakan pendeknya tinggi badan menurut perhitungan usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) menurut data WHO yang disebabkan oleh asupan nutrisi yang tidak cukup dan/atau infeksi berulang (kronis) yang terjadi dalam 1000 HPK. Jadi, *stunting* ini dapat terjadi dimulai dari pola makan ibu yang kurang bernutrisi saat hamil dan berdampak pada tumbuh kembang janin/anaknya (WHO, 2015).

Dampak yang dialami oleh penderita *stunting* dapat mengakibatkan gangguan kognitif seperti perkembangan motorik dan juga gangguan pada fungsi otak. Dan hal ini dapat terjadi tidak hanya karena ibu dan anak kekurangan makanan yang bergizi melainkan bisa terjadi karena kurangnya air bersih. Faktor lingkungan dari adanya air bersih ini pastinya perlu juga diperhatikan agar tidak menyebabkan penyakit infeksi seperti diare pada ibu dan anak, begitu juga dalam mengalami cacingan. Maka, pemerintah juga harus bisa memadai penyediaan sanitasi air bagi masyarakat dalam upaya pencegahan *stunting* pada ibu dan juga anak (Nisa et al., 2021).

Salah satu faktor penyebab anak *stunting* juga bisa terjadi karena faktor ekonomi keluarga. Keluarga yang cenderung miskin, tidak dapat membeli makanan yang bernutrisi bagi keluarganya. Dengan faktor ekonomi inilah yang membuat ibu hamil tidak ternutrisi dengan baik sehingga dapat berujung pada dampak buruknya yaitu lahirnya anak yang *stunting*. Kesulitan pangan ini menjadi salah satu masalah juga bagi masyarakat yang miskin di Banyuwangi untuk mereka terhindar dari adanya *stunting*, dengan demikian Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu menanggapi hal ini dengan serius dengan menangani faktor-faktor yang dapat menyebabkan *stunting* (Sihite & Chaidir, 2022).

Dalam upaya pencegahan dan juga menurunkan angka *stunting* pada anak, Kabupaten Banyuwangi membuat banyak program-program kesehatan yang dapat memberikan edukasi maupun bantuan pemberian makanan bernutrisi secara langsung. Hal ini dilakukan oleh lembaga kesehatan yang ada di Banyuwangi lewat aspek pemantauan tumbuh kembang anak yang mereka pantau lewat layanan Posyandu yang salah satu fokus utamanya adalah memberikan layanan kesehatan tumbuh kembang anak. Menurut data yang ada, angka kematian seorang ibu akibat kehamilan, persalinan, dan nifas menurun secara drastis pada tahun 2014 hingga 2017 yang dilakukan pemerintah Banyuwangi melalui cara meningkatkan akses dan cakupan untuk kesehatan ibu, lalu membangun kemitraan yang efektif melalui adanya kerjasama lintas program yang mendorong para ibu untuk memanfaatkan layanan pemerintah yang ada demi kesehatan mereka (Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dinas Kesehatan, 2020).

Dilansir dari berita di Detik.com pada Februari 2023 pada acara "Kick Off Meeting Pancasila dalam Tindakan: Gerakan Semesta Berencana Mencegah *Stunting*, Kekerasan Seksual pada Anak dan Perempuan, KDRT, dan Mengantisipasi Bencana" bahwa masyarakat Banyuwangi mendapatkan bantuan berupa makanan yang berprotein tinggi untuk sekitar 1.300 balita *stunting* dan juga ibu hamil yang berisiko tinggi setiap hari selama setahun ini. Dengan pengeluaran anggaran hingga 7 miliar ini akan digunakan oleh Pemerintah Banyuwangi untuk membagikan makanan tersebut melalui pedagang sayur keliling, yang dimana selain berupaya untuk menurunkan angka *stunting* dan ibu hamil yang berisiko tinggi, upaya ini juga dilakukan juga untuk mendukung perekonomian masyarakat Banyuwangi yang menengah ke bawah melalui aplikasi "Tanggap *Stunting*" (Perdana, 2023).

Di sisi lain juga Bupati Banyuwangi, Ibu Ipuk Fiestiandani juga menyampaikan lewat wawancaranya di halaman berita online Kompas.com bahwa beliau memiliki mimpi saat 2024 nanti bisa mencapai angka penurunan dibawah 14 persen dalam prevalensi *stunting* di Banyuwangi dan pada tahun-tahun ke depannya bisa mencapai nol persen. Rencana ini sangatlah bagus untuk mewujudkan agenda dari SDG sendiri yang dimana pada tahun 2030 bisa mencapai keberhasilan dari tujuan pembangunan berkelanjutan untuk tidak ada lagi kelaparan di Banyuwangi dan bisa diterapkan ke seluruh ibu kota di Indonesia juga melalui program "Banyuwangi Tanggap *Stunting* (BTS)" yang disebut oleh Ibu Ipuk pada Desember 2022 lalu. Program BTS ini tidak hanya dengan pemberian makanan tambahan (PMT), tapi juga mengatasi penyebab lainnya, yaitu dari faktor lingkungan dengan membangun beberapa tempat mandi, cuci, kakus (MCK) di beberapa titik Banyuwangi (Shofihara, 2022).

Pada 24 Agustus 2023 program yang dibuat oleh Pemerintah Banyuwangi dipuji oleh masyarakat melalui programnya bersama Danone Indonesia "Isi Piringku" yang berlangsung selama 4 bulan dengan mengikutsertakan para Ibu dan PKK dalam gerakan pencegahan *stunting* ini. Dalam program ini disebutkan bahwa target dari program ini yaitu untuk membawa kesehatan ke banyak orang, terutama kesehatan untuk anak penderita *stunting* dan juga para ibu yang memang berisiko mengalami kasus yang sama. Dalam upaya mengurangi angka *stunting* yang ada di Banyuwangi, pemerintah Banyuwangi bersama Danone Indonesia yang berkolaborasi dengan SPEKTRA juga memantau perkembangan sebelum, selama, dan setelah program ini berlangsung, apakah ini berdampak besar dalam menyelamatkan masyarakat Banyuwangi dari *stunting* atau tidak untuk mencapai fokus mereka dalam pemberdayaan kesehatan, pendidikan, dan juga advokasi pembangunan. Cara yang dilakukan dalam program ini juga mencakup adanya pemberian pelatihan dan juga pendampingan tentang tumbuh kembang anak dan juga pola asuh anak dalam pencegahan *stunting* kepada para Ibu (Fundrika, 2023).

Pada tanggal 24 Juli 2023 lalu, Ibu Iriana Jokowi dan Ibu Wury selaku Ibu Negara bersama dengan anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) resmi mengesahkan adanya program "Gerakan Anak Sehat" di Kabupaten Banyuwangi. Dalam pencegahan *stunting* ini, mereka bersama-sama bergerak untuk memenuhi asupan gizi lewat makanan yang berprotein kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan pertolongan dari permasalahan *stunting* ini. Karena program ini dimulai di Kabupaten Banyuwangi, Banyuwangi mendapatkan kesempatan untuk menjadi *Pilot Project* "Gerakan Anak Sehat" ini dengan sasaran keberhasilan program ini bisa mencapai 351 balita di 4 kecamatan dan tentunya dengan harapan program ini bisa berjalan dengan program yang akan datang nanti bersama KEMENKES (UPK Kemenkes, 2023).

Dalam program lainnya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga membuat program cegah *stunting* dan anemia bersama Kementerian Agama Banyuwangi dan juga Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi menggelar acara ini di Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyuwangi sebagai lokasi utama dari kegiatan program ini. Walaupun Pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum merasa cukup dengan penurunan angka *stunting* di Banyuwangi dari

angka 20,1% pada tahun 2021 turun menjadi 19,2% pada 2022. Angka penurunan tersebut sudah menjadi angka dibawah rata-rata nasional (21,6%). Kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah melakukan olahraga bersama dan juga memberikan edukasi kepada anak-anak tentang pencegahan *stunting* dan pola hidup sehat (Arifin, 2023).

Program edukasi kesehatan lainnya juga dilakukan di sekolah-sekolah di Banyuwangi, seperti di SMAN 1 Wongsorejo. Program ini dibuat oleh Bank Central Asia (BCA) dan Puteri Indonesia 2023, serta Dinas kesehatan & Posyandu setempat. Mereka bersama-sama membuat program “Edukasi Kesehatan: Ayo Cegah *Stunting!* Bakti BCA” selain untuk pencegahan *stunting* juga BCA ingin menunjukkan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat Banyuwangi. Dan dalam acara ini sebutkan bahwa penyebab *stunting* tidak hanya karena kekurangan gizi saja, melainkan bisa terjadi karena maraknya pernikahan anak. Dari penyebab maraknya pernikahan anak ini, muncul juga ide dari Ibu Ipuk bahwa di Banyuwangi akan dibuat program baru tentang *parenting*. Selain itu juga disajikan data bahwa alasan terbanyak anak mengalami *stunting* karena pola asuh anak yang kurang baik, yang dimana dijelaskan oleh Farhana Nariswari Wisandana yang merupakan Puteri Indonesia 2023 ini bahwa efek buruk dari nikah muda dapat menyebabkan kelahiran bayi *stunting* (Kumparan, 2023).

Edukasi tentang efek buruk dari nikah muda ini bisa terbilang jarang ada, karena tidak semua masyarakat mendapatkan edukasi yang cukup tentang ini. Efek buruk dari nikah muda yang dapat menyebabkan kelahiran bayi *stunting* ini tidak hanya karena faktor ekonomi dari kedua orang tuanya melainkan juga bisa terjadi karena kurangnya edukasi kepada para ibu tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif, pemberian MPASI dini yang dapat dimulai saat anak setelah usia 6 bulan, dan juga pengetahuan para ibu akan pentingnya asupan energi, protein, kalsium, zat besi, dan zink. Jika anak tidak mendapatkan hal yang disebutkan tersebut, maka dampak buruk dari *stunting* tersebut dapat dialami oleh anak dan ibunya sendiri (Nirmalasari, 2020).

Berdasarkan hasil data dari prevalensi *stunting* Banyuwangi tahun 2018-2022, selama lima tahun ini dapat dilihat bahwa angka *stunting* tertinggi ada di tahun 2018 dengan jumlah 32%. Melalui program pencegahan dan gerakan penanganan *stunting* yang telah dijalani sebelumnya, membuahkan hasil baik pada angka penurunan angka *stunting* di Banyuwangi. Pada tahun 2019, angka tersebut menurun kembali menjadi 24,46% yang menunjukkan lagi upaya Pemerintah Banyuwangi dalam memberikan edukasi dan juga bantuan secara langsung sangat berdampak baik pada masyarakat. Disusul kembali pada tahun 2021, penurunan hingga 20,1% dengan selisih dari tahun sebelumnya hingga 4,36%. Tentu angka penurunan ini tidak cukup membuat Bupati Banyuwangi puas, melainkan menjadi pendorongnya untuk bersama-sama Dinas Kesehatan Banyuwangi bergerak untuk mencegah kasus *stunting* lagi di Banyuwangi. Dan dari data yang terakhir pada tahun 2022, dapat dilihat bahwa angka penurunan *stunting* di Banyuwangi terus menurun hingga 19,2%. Angka dari penurunan *stunting* pada tahun 2022 ini sudah termasuk angka dibawah angka rata-rata tingkat nasional yaitu 21,6%.

Dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), peraturan ini didasari dengan adanya agenda SDGs yang telah disepakati oleh berbagai negara maju bersama dengan PBB mengejar pencapaian tujuan dari SDGs. Tujuan dasar dari agenda ini adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, dan tata kelola. Pencegahan *stunting* inilah yang akan menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan SDGs nomor 2.2, melewati upaya pencegahan ini seluruh negara yang terlibat dapat memperbaiki satu per satu penyebab masyarakat yang kelaparan dengan perbaikan gizi (Situmeang & Putri, 2021).

Dengan demikian Banyuwangi mulai bergerak dengan harapan ke depan agenda ini tidak hanya sebagai rencana tujuan global saja melainkan menjadi hasil nyata bagi Banyuwangi bahkan bisa diterapkan di seluruh Kabupaten di Indonesia. Kontribusi yang sudah berjalan melalui program-program bantuan dan edukasi kepada masyarakatnya sangatlah membantu Indonesia dalam mencapai tujuan dari SDG poin ke 2.2 yaitu untuk

memberantas segala bentuk dari adanya kekurangan gizi, seperti kasus *stunting* untuk memenuhi kebutuhan gizi anak dan juga ibunya.

Pembuatan program dalam upaya menurunkan angka *stunting* ini tentunya tidaklah mudah bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, karena banyak tantangan dan kendala yang harus mereka lalui seperti kendala lambatnya pemantauan tumbuh kembang anak di Banyuwangi, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Hal ini menjadi kendala bagi Pemerintah Banyuwangi terutama Dinas Kesehatan Banyuwangi karena proses pemantauan tumbuh kembang anak di pedesaan masih menggunakan cara manual dan juga pengetahuan yang dimiliki warga pedesaan lebih minim yang membuat masyarakat tidak aktif dalam melaporkan kasus *stunting* kepada layanan kesehatan yang ada di sekitar rumahnya (Hakim et al., 2022).

Dengan demikian Pemerintah Banyuwangi mengatasi kendala ini dengan cara membuat *platform* berbasis teknologi, yang dimana berharap dapat mempermudah masyarakat yang tinggal di pedesaan Banyuwangi untuk mengakses. Dan pada akhirnya Pemerintah Banyuwangi membuat aplikasi yang bernama “Banyuwangi Smartkampung” pada tahun 2015, agar warga tidak perlu bertemu petugas untuk melakukan permohonan dan juga layanan perihal *stunting* yang jauh dari rumah masyarakat yang tinggal di pedesaan. “Banyuwangi Smartkampung” ini juga dijadikan program pengembangan desa di Kabupaten Banyuwangi untuk mendekatkan pelayanan publik hingga level desa. Yang dimana, setiap desa sudah didesain memiliki kerangka programnya masing-masing untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan-kesehatan, dan juga kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat (Rimawati, 2023).

Penulis memberikan implementasi baru untuk Pemerintah Banyuwangi selain program-program yang sudah berjalan sekarang, untuk upaya penurunan angka *stunting* yang berkelanjutan hingga tidak adanya lagi kelaparan seperti yang ada dalam agenda *Sustainable Development Goals* poin ke 2 sebaiknya Pemerintah Banyuwangi mencoba cara-cara lain yang tidak hanya memberikan edukasi dan juga bantuan pangan kepada masyarakat Banyuwangi. Cara lain yang dimaksud, bisa dengan cara mengikutsertakan anak-anak muda untuk menjadi bagian penggerak program pencegahan *stunting* di Banyuwangi. Dengan menggunakan ide-ide anak muda, akan lebih mudah menyampaikan begitu pentingnya untuk mengkonsumsi makanan yang bernutrisi bagi ibu-ibu muda atau pasangan yang nikah muda. Dan mereka bisa menerapkannya di sekolah-sekolah tentang edukasi *stunting* itu sendiri, yang dimana edukasi tentang *stunting* ini kurang diajarkan oleh guru selama di sekolah.

Untuk ke depannya dalam upaya menurunkan angka *stunting* di Banyuwangi, pemerintah bisa mengikutsertakan Ketua RT dan Ketua RW untuk ikut proaktif dalam memantau dan membantu warga yang ada di daerahnya masing-masing. Hal ini dilakukan agar Ketua RT dan RW dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan pentingnya gizi yang baik dan membantu melakukan praktik kesehatan kepada warganya. Selain itu, pengikutsertaan Ketua RT dan RW ini dilakukan dengan tujuan penurunan angka *stunting* di Banyuwangi berjalan dengan secara merata, hingga daerah-daerah yang sulit diakses sekalipun dan pemantauan dari kasus *stunting* bisa lebih diperhatikan per keluarga demi keluarga.

Yang terakhir pemerintah bisa menekankan sekolah-sekolah untuk guru dapat mengajarkan pentingnya mengkonsumsi makanan yang bergizi dari kecil, agar anak-anak tahu tentang bahaya gangguan *stunting* dan lebih memperhatikan 1000 hari kehidupan pertama. Dan para murid dapat mengetahui bahwa pemerintah dapat memberikan bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk berkesempatan menerima bantuan pangan yang bergizi bagi ibu dan anak.

Selain itu juga Kabupaten Banyuwangi juga harus meningkatkan anggaran per tahunnya untuk program pencegahan *stunting* ini. Dikarenakan 7 miliar ini dianggap kurang cukup untuk menurunkan angka *stunting* yang ada di Kabupaten Banyuwangi secara menyeluruh sampai nol *stunting*. Dengan kendala yang disebutkan sebelumnya bahwa kesulitan untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di pedesaan, lebih baik Kabupaten

Banyuwangi menaikkan anggaran untuk membangun sumber pangan yang berkualitas bagi masyarakat yang tinggal disana. Selain itu, anggaran tersebut bisa membuat layanan kesehatan di pedesaan lebih banyak lagi, yang dapat memudahkan para masyarakat yang tinggal di pedesaan itu. Dan yang terakhir, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat menggunakan anggaran ini untuk menyediakan sanitasi air bersih untuk rumah-rumah.

Jika anggaran tidak dapat ditambahkan lebih besar lagi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat menjangkau para *stakeholder* seperti perusahaan-perusahaan skala regional, nasional, dan internasional sebagai bentuk kerjasama tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat atau program ini bisa disebut salah satu program CSR (*Corporate Social Responsibility*). Dengan bantuan dana dari perusahaan-perusahaan yang ada, bisa cukup membantu pemerintah untuk terus gencar dalam mengatasi kasus *stunting* dengan program-program edukasi, bantuan, dan pemantauan yang ada. Melalui kerjasama dengan para *stakeholder*, pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga dapat bekerjasama dengan perusahaan di bidang digital untuk memperluas platform pemantauan *stunting* yang lebih memadai.

SIMPULAN

Penelitian ini menjelaskan upaya yang dilakukan Kabupaten Banyuwangi dalam menurunkan angka *stunting* melalui program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Banyuwangi telah mencapai kemajuan signifikan dalam mengatasi masalah *stunting* di daerah tersebut. Melalui alokasi dana sebesar 7 Miliar Rupiah per tahun untuk program-program penurunan angka *stunting*, Kabupaten Banyuwangi telah berhasil menunjukkan komitmen serius mereka dalam menuju tercapainya *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 2.2 untuk mencapai angka nol *stunting*. Dalam kesimpulan ini, dibahas beberapa poin kunci yang menunjukkan keberhasilan Kabupaten Banyuwangi dalam menurunkan angka *stunting* dan memberikan saran untuk meningkatkan alokasi dana guna mencapai hasil yang lebih optimal.

Pertama, program-program yang dibiayai oleh dana sebesar 7 Miliar Rupiah per tahun ini telah membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi yang seimbang dan perawatan kesehatan selama kehamilan dan pertumbuhan anak-anak. Inisiatif ini melibatkan pendekatan holistik yang mencakup edukasi, pemantauan kesehatan, serta pemberian pangan yang bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil. Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam status gizi anak-anak dan penurunan angka *stunting*.

Kedua, Banyuwangi telah berhasil mengintegrasikan program-program tersebut dengan infrastruktur kesehatan yang ada, seperti puskesmas dan layanan kesehatan masyarakat. Hal ini telah meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan layanan kesehatan untuk masyarakat di Banyuwangi. Dengan adanya layanan kesehatan dan juga program-program yang ada inilah yang pada akhirnya turut mendukung penurunan angka *stunting* di Kabupaten Banyuwangi melebihi angka rata-rata nasional.

Namun, meskipun upaya yang dilakukan selama ini bisa terbilang cukup efektif, penelitian ini juga menyoroti bahwa alokasi dana sebesar 7 Miliar Rupiah per tahun mungkin masih kurang cukup untuk mencapai hasil yang optimal. Peningkatan anggaran diperlukan untuk memperluas cakupan program dan mencapai lebih banyak keluarga di desa-desa yang membutuhkan perhatian lebih, karena kendala masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan disana. Selain itu, penggunaan dana tambahan dapat digunakan untuk peningkatan pelatihan tenaga medis, memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi, serta menggandeng pihak swasta dan lembaga internasional dalam mendukung program-program tersebut.

Selain menambahkan dana yang ada, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga bisa bekerjasama lebih banyak dengan berbagai pihak. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengajak perusahaan swasta yang ada dan juga organisasi non pemerintah untuk ikut membantu penurunan angka *stunting* di Kabupaten

Banyuwangi. Dengan menambahkan dana yang ada, penulis percaya bahwa akan lebih banyak lagi masyarakat yang bisa dijangkau untuk mengatasi masalah gizi tersebut.

REFERENSI

- Anjarwati, D., Priyanto, H., & Hentika, N. (2023). Kajian Implementasi Program Banyuwangi Tanggap Stunting Di Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Wonosobo Kecamatan Srono. *Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 4(1), 271–280. <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i1.3568>
- Annur, C. (2023, February). *Ini Rincian Angka Balita Stunting di Wilayah Jawa Timur pada 2022, Kabupaten Jember Terbesar*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/14/ini-rincian-angka-balita-stunting-di-wilayah-jawa-timur-pada-2022-kabupaten-jember-terbesar>
- Arifin, S. (2023, March). Gerakan Serentak Aksi Bergizi, Upaya Serious Pemkab Banyuwangi Kurangi Kasus Stunting. *TIMES Banyuwangi*. <https://banyuwangi.times.co.id/news/berita/oihwumbhdd/Gerakan-Serentak-Aksi-Bergizi-Upaya-Serious-Pemkab-Banyuwangi-Kurangi-Kasus-Stunting>
- BAPPENAS. (2010). *Upaya Pencapaian Millennium Development Goals (MDGs)*. <https://www.bappenas.go.id/index.php/berita/upaya-pencapaian-millennium-development-goals-mdgs>
- Bappenas. (2019). *Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur*.
- Dinkes Banyuwangi. (2021). *INOVASI “GenerASI Anak TOP” Gerakan memberi Air Susu. Ibu, anak Tumbuh Optimal*. PUSKESMAS SEMPU – Dinas Kesehatan Banyuwangi. <https://dinkes.banyuwangikab.go.id/portal/generasi-anak-top/>
- Fundrika, B. (2023, September). Turunkan Angka Stunting, Program Isi Piringku di Banyuwangi Terus Digenjot. *Suara.com*.
- Hakim, L., Umam, K., Utomo, A. P., & Raharjo, R. (2022). Penyuluhan Pemanfaatan Sistem Informasi Status Gizi Anak Untuk Pendeteksian Kasus Stunting Di Puskesmas Kabat Kabupaten Banyuwangi. *Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, 2(2), 109–116. <https://doi.org/10.29303/darmadiksani.v2i2.1958>
- Hariyadi, D., & Ekayanti, I. (2011). Analisis Pengaruh Perilaku Keluarga Sadar Gizi Terhadap Stunting Di Propinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Teknologi, Kejuruan, dan Pengajarannya*, 34(1), 7180. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/tk.v34i1.3021>
- Kumparan. (2023). *Stunting di Banyuwangi Mayoritas Disebabkan Pola Asuh yang Kurang Tepat*. Kumparan.com. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/stunting-di-banyuwangi-mayoritas-disebabkan-pola-asuh-yang-kurang-tepat-20xVilPLWoK>
- Nirmalasari, N. O. (2020). Stunting Pada Anak: Penyebab Dan Faktor Risiko Stunting Di Indonesia. *QAWWAM*, 12(1), 19–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/komunitas.v9i2.2188>
- Nisa, S. K., Lustiyati, E. D., & Fitriani, A. (2021). Sanitasi Penyediaan Air Bersih dengan Kejadian Stunting pada Balita. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 2(1), 17–25. <https://doi.org/10.15294/jppkmi.v2i1.47243>
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dinas Kesehatan. (2020). *Profil Kesehatan 2019*.
- Perdana, D. (2023, February). Stunting Banyuwangi Turun di Bawah Nasional, Bupati Ipuk Beberkan Kuncinya. *detikjatim*. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6573169/stunting-banyuwangi-turun-di-bawah-nasional-bupati-ipuk-beberkan-kuncinya>
- Purbowati, M. R., Ningrom, I. C., & Febriyanti, R. W. (2021). Gerakan Bersama Kenali, Cegah, dan Atasi Stunting Melalui Edukasi Bagi Masyarakat di Desa Padamara Kabupaten Purbalingga. *AS-SYIFA : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat*, 2(1), 15. <https://doi.org/10.24853/assyifa.2.1.15->

- Rimawati, E. (2023, July). Keunggulan Smart Kampung Banyuwangi Dipaparkan di ASEAN Smart City Network. *detikjatim*. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6822005/keunggulan-smart-kampung-banyuwangi-dipaparkan-di-asean-smart-city-network>
- Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. (2020). *Peta Jalan Percepatan Pencegahan Stunting Indonesia 2018-2024*.
- Shofihara, I. (2022, December). Targetkan Stunting di Bawah 14 Persen pada 2024, Bupati Ipuk Sambangi Pelosok-pelosok Desa. *Kompas.com*. <https://kilasdaerah.kompas.com/banyuwangi/read/2022/12/02/09443801/targetkan-stunting-di-bawah-14-persen-pada-2024-bupati-ipuk-sambangi-pelosok>
- Sihite, N. W., & Chaidir, M. S. (2022). Keterkaitan kemiskinan, kecukupan energi dan protein dengan kejadian stunting balita di Puskesmas 11 Ilir Palembang. *Darussalam Nutrition Journal*, 6(1), 37. <https://doi.org/10.21111/dnj.v6i1.7083>
- Situmeang, N., & Putri, S. Y. (2021). Implementasi Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Pada Kasus Stunting Di Indonesia. *Jurnal PIR Power In International Relations*, 5(2), 163–174. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22303/pir.5.2.2021.163-174>
- Sofianto, A. (2019). Integrasi Target Dan Indikator Sustainable Development Goals Ke Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 17(1), 25–41. <https://doi.org/10.36762/litbangjateng.v17i1.769>
- Su'udi, A., & Pratiwi, P. (2022). Angka Stunting di Banyuwangi Meningkat, Dinkes Ungkap Penyebabnya. *Kompas.com*. <https://surabaya.kompas.com/read/2022/03/09/110022578/angka-stunting-di-banyuwangi-meningkat-dinkes-ungkap-penyebabnya>
- Sutarto, Mayasari, D., & Indriyani, R. (2018). Stunting, Faktor Resiko dan Pencegahannya. *J Agromedicine*, 5(1), 540–545.
- Sutopo, A., Arhati, D. F., & Rahmi, U. A. (2014). Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs). *Kajian Indikator Lintas Sektor*, 1–162.
- Tarmizi, S. (2023). *Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4%*. Sehat Negeriku. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/>
- UPK Kemenkes. (2023). *Kabupaten Banyuwangi Resmi Menjadi Pilot Project Gerakan Anak Sehat untuk Cegah Stunting*. Upk.kemkes.go.id. <https://upk.kemkes.go.id/new/kabupaten-banyuwangi-resmi-menjadi-pilot-project-gerakan-anak-sehat-untuk-cegah-stunting>
- WHO. (2015). *Stunting in a nutshell - Chapter 1. Stunted growth: What is it?* Who.int. <https://www.who.int/multi-media/details/stunting-in-a-nutshell-chapter1>
- Yasmin, L. (2023, October). Dapat Premi Jaminan Sosial, Ribuan Kader Posyandu Banyuwangi Tancap Gas Berburu Stunting. *TIMES Banyuwangi*. <https://banyuwangi.times.co.id/news/berita/k2rozoeqfg/Dapat-Premi-Jaminan-Sosial-Ribuan-Kader-Posyandu-Banyuwangi-Tancap-Gas-Berburu-Stunting>

.

.